

KONDISI KETENAGAKERJAAN; KESEMPATAN KERJA DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA INDUSTRI MASYARAKAT LOKAL PADA WILAYAH DESA BERBASIS INDUSTRI

Khumaidi, Heri Sunarno
Universitas Yudharta Pasuruan
khumaidi@yudharta.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya amanat regulasi yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan, khususnya kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja industri dari masyarakat lokal atau masyarakat sekitar dimana industri itu berada. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dimana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan pengumpulan dokumen. Kemudian dianalisa dengan model interaktif. Untuk lebih menguatkan hasil penelitian ini digunakan model triangulasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kondisi ketenagakerjaan terkait kesempatan kerja yaitu masyarakat lokal atau masyarakat sekitar industri berdomisili memiliki kesempatan kerja sebesar 65,53% memiliki kesempatan/ peluang kerja. Sedangkan kondisi ketenagakerjaan, khususnya penyerapan tenaga kerja yaitu masyarakat lokal atau masyarakat sekitar industri berdomisili memiliki kesempatan kerja sebesar 20,80% terserap atau memenuhi permintaan tenaga kerja industri.

Kata Kunci: Ketenagakerjaan, Penyerapan Tenaga Kerja Industri

Abstract:

This research is motivated by a regulatory mandate, namely the Pasuruan Regency Regional Regulation Number 22 of 2012 concerning the Manpower Implementation System in Pasuruan Regency, in particular employment opportunities and absorption of industrial labor form local communities or local communities where the industry is local. This research is a qualitative descriptive study, where data is collected through observation, interviews and document collection. then analyzed with an interactive model. To further strengthen the results of this study a triangulation model is used. The results of the study explained that the labor conditions related to job opportunities, namely local communities or communities around the industrial area where they are domiciled have a job opportunity of 65.53% have a job opportunity. Meanwhile, the employment conditions, in particular the absorption of labor, namely local communities or communities around the domiciled industry have a job opportunity of 20.80% absorbed or fulfilling the demand for industrial labor.

Keywords: Employment, Industrial Labor Absorption

Pendahuluan

Ketenagakerjaan mencakup tenaga kerja, kesempatan kerja, permintaan kerja dan penyerapan tenaga kerja sebelum, selama dan sesudah kerja sesuai dengan ketentuan.¹ Ketenagakerjaan juga merupakan barang dan jasa, dikarenakan merupakan *soft infrastructure*². Sifat kepublikan itu, maka pelayanan ketenagakerjaan perlu disediakan sekaligus pemenuhan kebutuhan *stakeholders*³.

Oleh karena itu, kualitas pelayanan menjadi penting. Kualitas dikonseptualisasikan dengan delapan dimensi: *performance, features, reliability, conformace, durability, service ability, aesthetics*, dan *perceived*⁴, yang kemudian diidentifikasi dengan lima pendekatan: transenden, produk, pengguna, manufaktur, dan nilai⁵. Sementara Nasution⁶ dan Sinambela⁷ melihat kualitas dengan kepuasan pengguna, dimana membandingkan *expected service* dan *perceived service*.

Jumlah industri dalam skala besar-sedang di wilayah Desa Sumpersuko termasuk terbesar di Kecamatan Gempol, Pasuruan.

Jumlah Industri Menurut Klasifikasinya

No	Desa	Industri Besar-Sedang	Industri Kecil	Industri Kerajinan Rumah Tangga
1.	Wonosunyo	-	13	1
2.	Sumpersuko	22	31	25
3.	Wonosari	4	14	11
4.	Kepulungan	13	17	11
5.	Randupitu	12	22	1
6.	Ngerong	15	12	18
7.	Jeruk Purut	2	7	2
8.	Karang Rejo	5	33	30
9.	Bulusari	5	13	14
10.	Watukosek	2	3	4
11.	Carat	5	14	6
12.	Kejapanan	15	37	29
13.	Winong	9	16	22
14.	Legok	7	29	73

¹ Simanjuntak, Payaman, J, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: BPFEUI, 1985), hlm 2; Ananta, Aris, *Modal Manusia dan Pembangunan Ekonomi Dalam Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Lembaga Demografi FEUI, 1990), hlm 286; Dwiyanto, Agus, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Prress, 2006), hlm 45.

² Grimsey, Darrin dan Lewis, Mervyn, K, *Public Private Partnerships: The Woldwide Revolution in Infrastructure Provision and Project Finance* (USA: Edward Elgar Publishing Limited, 2004), hlm 20-23.

³ Savas, E. S, *Privatization: The Key to Better Government*, (Chatham: Catham House Publishers, Inc, 1987); Sinabela, Lajian Poltak dkk, *Reformasi Pelayanan Publik*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm 47.

⁴ Garvin, D. A, *Competing on the Eight Dimensions of Quality*. (Harvard Business Review, 65 (6), 1987), hlm 101-109.

⁵ Garvin, D.A, *Managing Quality: The Strategic and Competitive Edge*, (in Dale H. Besterfield, Carol Besterfield- Michna, Glen H. Besterfield, Mary Besterfield – Scave (eds), Total Quality Management, New York, Free Press, Prentice-Hall, 1988).

⁶ Nasution, M.N, *Manajemen Mutu Terpadu*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), hlm 47.

⁷ Sinabela, Lajian Poltak dkk, *Reformasi Pelayanan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm 43.

15.	Gempol	11	37	11
	Jumlah	127	298	258

Sumber: BPS, Koordinator Kecamatan Gempol, 2015

Merujuk pada data itu, desa ini merupakan desa berbasis industri skala besar-sedang. Besarnya jumlah industri tentu harus berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja industri masyarakat lokal, yaitu masyarakat yang hidup dan tinggal di sekitar bangunan industri berada.

Konsep Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan meliputi: tenaga kerja, kesempatan kerja, permintaan dan penyerapan tenaga kerja. Tenaga kerja (*man power*) diartikan bekerja atau mengerjakan sesuatu dan penduduk sudah, sedang bekerja, dan mencari pekerjaan⁸. Ananta⁹ menyebut penduduk potensial, menghasilkan barang dan jasa, ada permintaan, dan mau berpartisipasi. Sementara¹⁰ lebih rinci dengan mengklasifikasi berdasarkan: (1) penduduk; tenaga dan bukan tenaga kerja, (2) batas kerja; angkatan dan bukan angkatan kerja, (3) kualitas; tenaga kerja terdidik, terlatih, serta tidak terdidik dan tidak terlatih.

Kesempatan kerja diartikan sebagai permintaan tenaga kerja (*demand for labor*), dapat dipenuhi dengan lapangan kerja yang luas. Menurut Gemici¹¹, pasar tenaga kerja, lokasi, dan model. Sedangkan Guler, Guvenen & Violante¹² mengemukakan pencarian pekerjaan bersama dan lokasi. Dalam penyediaan lapangan kerja tentu dengan pembangunan industri (industrialisasi).

Permintaan tenaga kerja merupakan jumlah tenaga kerja diminta pada berbagai tingkat upah, dipengaruhi: (1) perubahan tingkat upah, mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi, (2) faktor lain yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja.

Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah dalam unit usaha, dipengaruhi dua faktor: (1) eksternal; pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran dan tingkat bunga, (2) internal; tingkat upah, produktivitas tenaga kerja, modal dan pengeluaran non upah.

Kondisi ketenagakerjaan menurut Mun'oz, Holman & McClelland diartikan dengan praktik perburuhan, Dia mengungkapkan dengan konsensus dan pendekatan analitis antara kualitas kerja (isi pekerjaan dan kondisi kerja) dan kualitas tenaga kerja. Isi pekerjaan menunjuk sifat kebebasan tenaga kerja. Kondisi

⁸ Simanjuntak, Payaman, J, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: BPFEUI, 1985), hlm 2

⁹ Ananta, Aris, *Modal Manusia dan Pembangunan Ekonomi Dalam Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Lembaga Demografi FEUI, 1990), hlm 286

¹⁰ Dwiyanto, Agus, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Prpress, 2006), hlm 45.

¹¹ Gemici, Ahu, *Family Migration and Labor Market Outcomes*, (Mimeo New York University, 2008).

¹² Guler, Bulent. Guvenen, Fatih & Violante, Giovanni L, *Joint-Search Theory: New Opportunities and New Frictions*, (Federal Reserve Bank of Minneapolis, Research Department Staff Report, 2009), 426.

pekerjaan mengacu pada fisik, psiko-sosial, dan tuntutan berkaitan pekerjaan¹³. Kondisi ketenagakerjaan diartikan pula sebagai jam kerja, cuti, perlindungan dan jaminan kesehatan, upah maupun kesenjangan output. Lebih luas kondisi ketenagakerjaan dapat disimpulkan dengan kondisi dimana mencakup kepatuhan hukum nasional dan internasional.

Berdasar penjelasan di atas, kondisi ketenagakerjaan merupakan tenaga kerja maupun calon tenaga kerja industri. Itu artinya kondisi ketenagakerjaan dapat dilihat dari jumlah masyarakat sebagai tenaga kerja industri. Hal ini dapat terlihat dengan membandingkan jumlah penduduk lokal dalam kategori usia produktif kerja (tenaga kerja lokal), jumlah industri skala besar-sedang dalam kemampuan penyerapan tenaga kerja minimal, dan jumlah tenaga kerja local yang diserap menjadi tenaga kerja industri.

Pelayanan Ketenagakerjaan

Savas¹⁴ menjelaskan pelayanan publik bisa kepemilikan (*public good*), dan operasi manajemen. Dia menggunakan pendekatan produk (*outcome*), maka dapat diidentifikasi kebutuhan bersifat publik dan privat. Menurutnya ada dua tolak ukur yang digunakan untuk membedakan kedua golongan tersebut, yaitu *exclusion* (privat) dan *consumption* (publik). Sementara Laing menyebut (1) pertimbangan tujuan politis, ketimbang mencapai tujuan ekonomi masyarakat, (2) pengguna layanan lebih dilihat posisinya sebagai warga Negara daripada sebagai pengguna layanan, (3) level pemanfaatan layanan¹⁵. Sedangkan¹⁶ mendasarkan pada jenis penyediaan layanan: (1) dilakukan antara pemerintah dan swasta, tetapi kewajiban utama ada pada pemerintah, (2) hanya dikelola oleh pemerintah dan bersifat pengaturan.

Menurut Sankri yang dikutip oleh Rewansyah menjelaskan bahwa produk layanan menurut sifatnya: privat, publik, publik-swasta. Bentuk pelayanan: (1) pemerintahan, (2) pembangunan, (3) utilitas, (4) sandang, pangan, dan papan, (5) kemasyarakatan. Ditinjau dari penyedia (*provider*), yaitu: (1) *government to government*, (2) *government to people*, (3) *company to people*, (4) *people to people*. Berdasarkan proses, langsung dan tidak langsung. Sifat dan karakteristik: vertikal, horizontal, pemerintahan, ke dalam, ke luar, dan prospektif¹⁷.

Berdasar pada penjelasan di atas, ketenagakerjaan merupakan *public good* bersifat *toll good*. Oleh karena itu, pelayanan penyerapan tenaga kerja merupakan pelayanan publik yang menjadi kewenangan pemerintah meskipun secara penyediaannya dapat dilakukan secara bersama-sama baik oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.

¹³ Pina, Vicente. Torres, Lourdes & Bachiller, Patricia, *Service quality in utility industries: the European Telecommunications sector*, (Managing Service Quality, Emerald Group Publishing Limited. 0960-4529, 2014), Vol. 24 No. 1, pp. 2-22.

¹⁴ Savas, E S, *Privatization: The Key to Better Government*, (Chatham: Catham House Publishers, Inc, 1987).

¹⁵ Dwiyanto, Agus, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006).

¹⁶ Lembaga administrasi Negara (LAN), *Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*. Jakarta: LANRI, 2006) h 7.

¹⁷ Rewansyah, Asmawi, *Kepemimpinan Dalam Pelayanan Publik*, (Jakarta: STIA-LAN, 2011), hlm 57.

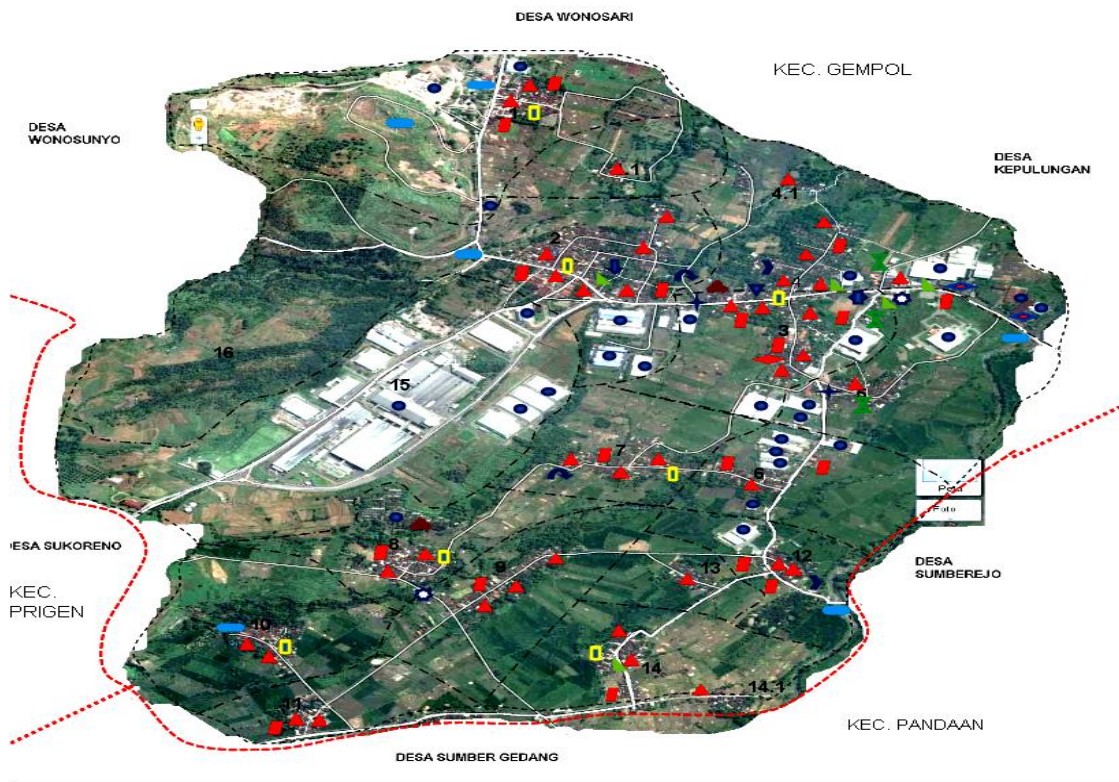
Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, interview, dan dokumentasi, kemudian dianalisa dengan menggunakan model interaktif, yang dikembangkan oleh Miles, Hubberman dan Saldana¹⁸, dan untuk melihat derajat kepercayaan atau kebenaran terhadap hasil penelitian menggunakan model yang dikembangkan oleh Denscombe yaitu triangulasi¹⁹.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian yang dikumpulkan melalui observasi, interview dan dokumentasi disajikan sebagai berikut:

Peta Potensi Ekonomi Desa Sumpersuko



Sumber: Hasil observasi dan dokumentasi, dari dokumen Desa Sumpersuko, 2020

Lingkaran bulat atau berwarna merah menunjukkan posisi bangunan industri di wilayah Desa Sumpersuko hampir merata pada setiap dusun. Gambar di atas dapat dimaknai industri yang berada di desa ini menunjukkan cukup besar. Secara detail nama dan jumlah industri dapat dijelaskan pada tabel berikut:

¹⁸ Miles, M.B. Hubberman, A.M. Saldana, Johny, *Qualitative Data Analysis: A Methods Souebook (3rd Edition)*, (Arizona State University: Sage Publications, 2014).

¹⁹ Denscombe, Martyn, *The Good Research Guide: For Small-Scale Social Research Projects*, (New York: Open University Press, 2007), Third Edition.

Daftar Nama Perusahaan di Desa Summersuko

No	Nama Perusahaan	Lokasi
1	PT. Sinar Sosro	Dsn. Sumberingin
2	PT. Bhineka Sukses F.	Dsn. Sumberingin
3	PT. Nature Teak S.	Dsn. Sumberingin
4	PT. Innopack	Dsn. Sumberingin
5	PT. Landkrona Indo N.	Dsn. Sumberingin
6	PT. SSM	Dsn. Wonogriyo
7	PT. Tri Perkasa M.	Dsn. Wonogriyo
8	PT. Jaya Persada	Dsn. Wonogriyo
9	PT. Yuan Shan	Dsn. Wonogriyo
10	PT. Mustika Light Metal	Dsn Bumbungan
11	PT. Harum Manis	Dsn Bumbungan
12	PT. Sarana Kreasi L.	Dsn Bumbungan
13	PT. Kreasi Indah C.	Dsn Bumbungan
14	PT. Insuma Global	Dsn Bumbungan
15	PT. Surya Terang	Dsn Bumbungan
16	PT. Diamond Topas P.	Dsn Bumbungan
17	PT. Darma Kumala U.	Dsn Bumbungan
18	PT. Tirta Marta	Dsn Bumbungan
19	PT. Sinar Mas Jaya	Dsn. Ngepek
20	PT. Sumber Murni	Dsn. Ngepek
21	PT. HUtama Neala	Dsn. Ngepek
22	PT. Tirta Mas Lestari	Dsn. Kaliputih
23	PT. Gudang Garam Tbk.	Dsn. Kaliputih
24	PT. Jati Sono	Dsn. Kaliputih
25	PT. Klampis Ireng	Dsn. Kaliputih
26	PT. Inti Utama F.	Dsn. Kaliputih
27	PT. Varia Usaha	Dsn. Jatikunci
28	PT. Berkas Granite	Dsn. Jatikunci
29	PT. Komega	Dsn. Jatikunci
30	PT. Sumber Mas	Dsn. Jatikunci
31	PT. Haka Aston	Dsn. Jatikunci
32	PT. Asa	Dsn. Jatikunci
33	PT. Subur Lancar	Dsn. Jatikunci
34	PT. Inti Utama Permai	Dsn. Jatikunci

Sumber: Hasil observasi dan dokumentasi, dari dokumen Desa Summersuko, 2020

Jumlah industri di Desa Summersuko sebesar 34 (tiga puluh empat) perusahaan, informasi itu dibenarkan oleh perangkat Desa Summersuko. Namun, perangkat desa lebih menjelaskan bahwa dari jumlah tersebut, ada 3 (tiga) perusahaan dalam kondisi pailit atau bangkrut. Sehingga data yang digunakan sebagai hasil penelitian tentang jumlah industri di wilayah Desa Summersuko sebesar 31 (tiga puluh satu) perusahaan.

Sejalan dengan klasifikasi industri, maka perusahaan yang berada di desa ini mampu menyerap minimal 3100 (tiga ribu seratus) tenaga kerja industri. Kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja belum dapat menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Oleh karena itu, diperlukan data jumlah penduduk usia produktif kerja dan jumlah penduduk yang terserap menjadi tenaga kerja industri.

Jumlah Penduduk Desa Sumpersuko
 Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

Golongan Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-5 Tahun	576	487	1.063
6-16 Tahun	573	545	1.118
17-24 Tahun	689	597	1.286
25 Tahun ke atas	1,794	1,650	3.444
Jumlah Total	3.632	3.279	6.911

Sumber: Hasil observasi dan dokumentasi, dari dokumen Desa Sumpersuko, 2020

Tabel di atas menunjukkan secara detail bahwa jumlah penduduk desa ini cukup besar, yaitu 6.911 jiwa. Tabel itu juga memberikan penjelasan tentang penduduk usia produktif kerja dan memiliki kesempatan kerja (usia 17-24 tahun dan 25 tahun ke atas) sebesar 4.730 jiwa terdiri dari 2.483 berjenis kelamin laki-laki dan 2.247 berjenis kelamin perempuan.

Selanjutnya, jumlah penduduk yang menjadi tenaga kerja industri dapat dilihat dari jumlah penduduk menurut mata pencaharian. Data tersebut dapat dilihat tabel berikut.

Jumlah Penduduk Desa Sumpersuko Menurut Mata Pencaharian dan Tingkat Pendidikan

Mata Pencaharian	Jumlah	Tingkat Pendidikan	Jumlah
Petani	365	Belum sekolah	538
Buruh tani	125	Tidak pernah sekolah	32
Buruh swasta	984	Pernah SD tidak lulus	56
PNS	25	Tamat SD sederajat	1.345
Guru swasta	19	SLTP	1.497
Pedagang	165	SLTA	925
Tukang kayu/batu	55	Sarjana	60
Peternak	34		
Montir	8		
Tenaga medis	2		
Jasa angkut	5		
Pensiunan	6		
TNI	6		
Pengrajin	27		
Penjahit	15		
Sopir	24		
Jumlah	1.865	Jumlah	4.453

Sumber: Hasil observasi dan dokumentasi, dari dokumen Desa Sumpersuko, 2020

Dalam tabel di atas tidak menyebutkan jumlah penduduk dengan mata pencaharian sebagai tenaga kerja industri, namun data pada tabel di atas memberikan pemahaman bahwa penduduk yang berjumlah 984 jiwa memiliki mata pencaharian sebagai buruh swasta sehingga data ini dapat dikatakan sebagai tenaga kerja industri. Artinya dari penduduk usia produktif kerja sebesar 4.730 jiwa, yang menjadi tenaga kerja industri sebesar 984 jiwa.

Sementara hasil interview dengan pemerintahan desa (perangkat desa dan BPD) tentang jumlah masyarakat lokal yang terserap menjadi tenaga kerja industri sebagai berikut:

..... *kulo mboten apal jeneng tiange, jumlahe mawon engge*

(saya tidak tahu pasti namanya, kalau jumlahnya saya tahu) di dusun Ngepek 17, Bumbungan 4, pabrik sandal 3, kresek 4, sosis 3, kayu 5, minuman 14, SKL 25, panci 40, sosro 12, innopeck 22, minuman/SSM 6, kayu 3, spon 17, cat 0, HN 16, total 22, teh 0, GG 741, klampis 6, jati sono 5, berkat 4, varia 9, batako 2, cat 0, spon 4.

Sumber: hasil wawancara, 2020

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pemerintahan desa tidak mengetahui secara detail nama warga masyarakat yang menjadi tenaga kerja industri yang berada di wilayah desa ini, namun diketahui jumlah warga masyarakat yang menjadi tenaga kerja pada masing-masing perusahaan di wilayah desa, yaitu sebesar 984 orang/ jiwa. Data hasil wawancara tentang jumlah masyarakat yang terserap sebagai tenaga kerja industri selaras dengan data hasil observasi dan dokumentasi.

Berdasar pada data hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa jumlah industri skala besar-sedang (mampu menyerap minimal seratus tenaga kerja) yaitu 31 (tiga puluh satu) perusahaan yang mampu menyerap minimal 3100 (tiga ribu seratus) tenaga kerja, jumlah masyarakat produktif kerja sebesar 4730 (empat ribu tujuh ratus tiga puluh), dan jumlah masyarakat lokal yang terserap sebagai tenaga kerja industri yaitu 984 orang.

Data hasil penelitian tersebut dapat dibandingkan untuk melihat kondisi ketenagakerjaan khususnya kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja industri masyarakat lokal usia produktif kerja. Kondisi ketenagakerjaan (kesempatan kerja) masyarakat lokal memiliki kesempatan kerja industri sebesar 65.53%. artinya hampir setiap masyarakat lokal usia produktif kerja memiliki peluang/ kesempatan kerja industri atau setiap masyarakat lokal produktif kerja dapat memenuhi permintaan tenaga kerja industri. Sementara kondisi ketenagakerjaan (penyerapan tenaga kerja industri) masyarakat lokal sebesar 20.80%.

Penyebutan istilah tenaga kerja dalam penelitian ini sejalan dengan pandangan Simanjuntak²⁰ yang menjelaskan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan, sedang bekerja dan orang yang sudah bekerja. Namun peneliti menambahkan industri dikarenakan agar lebih fokus pada tenaga kerja industri (perusahaan skala besar-sedang), maupun pendapat Ananta yang lebih menekankan tiga syarat, yaitu

²⁰ Simanjuntak, Payaman J, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: BPFEUI, 1985)

penduduk potensial yang dapat menghasilkan barang dan jasa, ada permintaan tenaga kerja, dan mereka mau berpartisipasi²¹.

Sementara usia produktif kerja dalam penelitian ini diambil dari usia 17 (tujuh belas) tahun ke atas. Penjelasan usia produktif ini selaras dengan paparan Dwiyanto yang menekankan usia produktif dalam tenaga kerja, dengan mengklasifikasi menjadi tiga, yaitu (1) didasarkan pada penduduk, (2) didasarkan pada batas kerja, dan (3) didasarkan pada kualitas tenaga kerja. Penjelasan tenaga kerja atas klasifikasi adalah tenaga kerja didasarkan pada penduduk terbagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja: jumlah penduduk dianggap mampu dan sanggup bekerja, ada permintaan tenaga kerja, dan berusia antara 15-64 tahun, dan bukan tenaga kerja²².

Sementara kesempatan kerja dan permintaan tenaga kerja lebih diartikan sebagai permintaan tenaga kerja (*demand for labor*), situasi penggambaran lapangan kerja yang tersedia dan siap diisi oleh para pencari kerja. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan kerja dan permintaan tenaga kerja dapat dipenuhi dengan adanya lapangan kerja. Lapangan kerja dalam penelitian ini dikhususkan pada pembangunan industri/ perusahaan di wilayah desa.

Beberapa pernyataan bahwa kesempatan kerja, permintaan tenaga kerja maupun penyerapan tenaga kerja dapat dipenuhi dengan adanya praktek industrialisasi terutama di wilayah desa. Disamping industrialisasi dapat menjembatani adanya kesenjangan, secara umum industrialisasi dapat membawa pengaruh pada nilai, fisik, usaha dan penyerapan tenaga kerja²³.

Industrialisasi dapat mengalami kesuksesan saat ada dukungan, masukan dan akses yang diberikan oleh penyelenggara pemerintahan²⁴. Di sisi lain, industrialisasi dilakukan di wilayah desa hanya menyebabkan pencemaran lingkungan, mengkonversi lahan pertanian kepada non-pertanian, mengubah ekonomi berbasis pertanian kepada industri berbasis layanan, hilangnya budaya lokal, dan petani tidak menemukan pekerjaan²⁵.

Selama ini kondisi ketenagakerjaan seringkali dilihat sebagai praktek perburuhan dan pula diartikan sebagai jam kerja, cuti, perlindungan dan jaminan kesehatan, upah, maupun output yang dihasilkan. Kondisi ketenagakerjaan dalam penelitian ini mengungkapkan kondisi ketenagakerjaan lebih luas, tidak hanya

²¹ Ananta, Aris, *Modal Manusia dan Pembangunan Ekonomi Dalam Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Lembaga Demografi FEUI, 1990), hlm 286.

²² Dwiyanto, Agus, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Prress, 2006), hlm 45.

²³ Parker dkk, *Sosiologi Industri*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992); Syaifullah, *Industrialisasi, Manusia Industri dan Perubahan Sosial*, (Jurnal Geografi GEA, 2009) 9 (1) hlm. 39-50; Hatu, Rauf, *Perubahan Sosial Kultural Masyarakat Pedesaan*, (Jurnal Inovasi, 2011). 8. (4), hlm 1-11; Ebrahimi, Mohammad Sadegh & Golabi, Soodeh, *Analysis of industrial Areas Effects In Rural Development A Case Study of Iran*, (Journal of Rural and Industrial Development, 2013). Vol.1 issue 2.; Kausik, Ritu, *Rural entrepreneurship and development of rural areas*. International, (Journal of Commerce and Management Research. ISSN: 2455-1627, Impact Factor: RJIF 5.22, 2015), Volume 1; Issue 2; Page No. 69-71.

²⁴ Asher, Sam. & Novosad, Paul, *Politics and Local Economic Growth: Evidence from India*, (JEL Codes: O12/P16/D72, 2015).

²⁵ Suu, Nguyen Van, *Industrialization and Urbanization in Vietnam Ho Appropriation of Agricultural Land Use Rights Transformed Farmers' Livelihoods in a Peri-Urban Hanoi Village?*, (Eadn Working Paper No. 38, 2009).

persoalan kualitas kerja dan kualitas tenaga kerja, akan tetapi mencakup kepatuhan industri terhadap hukum nasional dan hukum internasional. Pendapat ini memberikan pemahaman bahwa kondisi ketenagakerjaan tidak hanya dilihat dari tenaga kerja sebelum, sedang dan sesudah bekerja, akan tetapi lebih menekankan aspek hukum maupun regulasi tentang ketenagakerjaan baik secara nasional maupun internasional, seperti kesempatan dan peluang masyarakat dalam ketenagakerjaan, prosedur permintaan tenaga kerja, proses penyerapan tenaga kerja, maupun hak dan kewajiban tenaga kerja.

Pemahaman tentang kondisi ketenagakerjaan di atas, secara umum dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah masyarakat usia produktif kerja, jumlah dan kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja, dan jumlah masyarakat lokal diserap menjadi tenaga kerja industri. Sehingga industrialisasi di wilayah desa dapat terlihat apakah membawa dampak positif atau negatif pada kondisi ketenagakerjaan terutama pada penyerapan tenaga kerja masyarakat lokal.

Berdasarkan sajian hasil penelitian tentang kondisi ketenagakerjaan di Desa Summersuko di atas, ditemukan bahwa jumlah warga masyarakat dalam kategori usia produktif kerja sebesar 4.730 jiwa, sementara jumlah industri sebesar 31 (tiga puluh satu) perusahaan yang memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja industri sebesar minimal 3100 (tiga ribu seratus) tenaga kerja. Sedangkan jumlah masyarakat lokal yang diserap menjadi tenaga kerja industri sebesar 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) orang. Data hasil penelitian tersebut dapat dibandingkan dan memberikan kesimpulan bahwa kondisi ketenagakerjaan (kesempatan kerja) masyarakat lokal memiliki kesempatan kerja industri sebesar 65.53%. artinya hampir setiap masyarakat lokal usia produktif kerja memiliki peluang/ kesempatan kerja industri atau setiap masyarakat lokal produktif kerja dapat memenuhi permintaan tenaga kerja industri. Sementara kondisi ketenagakerjaan (penyerapan tenaga kerja industri) masyarakat lokal sebesar 20.80%.

Melihat hasil perbandingan itu, dilihat dari perspektif administrasi pembangunan, industrialisasi di wilayah desa ini membawa dampak positif pada kondisi ketenagakerjaan dari sisi peluang/ kesempatan kerja masyarakat lokal/ masyarakat sekitar industri berada, seperti yang telah dipaparkan oleh Parker, Syaifullah, Hatu, Ebrahimi & Soodeh, dan Kausik seperti pada nilai, fisik, usaha dan penyerapan tenaga kerja). Akan tetapi, belum memberikan dampak positif pada kondisi ketenagakerjaan khususnya penyerapan tenaga kerja industri dari masyarakat lokal/ masyarakat sekitar industri berada.. Kondisi ini hampir sama dengan di Vietnam yang telah dijelaskan oleh Suu, saat industrialisasi dilakukan di wilayah desa hanya menyebabkan pencemaran lingkungan, mengkonversi lahan pertanian kepada non-pertanian, mengubah ekonomi berbasis pertanian kepada industri berbasis layanan, hilangnya budaya lokal, dan petani tidak menemukan pekerjaan.

Dilihat dari perspektif pelayanan publik, meskipun ketenagakerjaan sebagai barang dan jasa public yang menjadi tanggungjawab pemerintah untuk penyediaannya, besarnya jumlah industri di desa ini belum mampu dioptimalkan oleh pemerintah desa untuk penyediaan layanan ketenagakerjaan. Meminjam istilah dari pelayanan yang menyebut pelayanan dapat dikatakan kualitas yaitu

perbedaan antara yang diharapkan dan yang diterima sesuai atau lebih baik yang diterima maka dipersepsikan baik. Begitu juga dengan ketenagakerjaan, saat industrialisasi di wilayah desa dapat sesuai dengan harapan di atas, maka kondisi ketenagakerjaan dipersepsikan baik atau jika harapan masyarakat lokal dapat diserap menjadi tenaga kerja industri maka kondisi ketenagakerjaan dapat disebut baik, dan jika tidak, maka kondisi ketenagakerjaan dapat dipersepsikan buruk.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan yang menyebutkan setiap perusahaan wajib melaporkan informasi lowongan kerja kepada SKPD, dan SKPD meneruskan kepada pemerintah desa (lihat Perda Kab.Pasuruan 22/2012 pasal 20). Regulasi itu memberikan kewajiban kepada pemerintah dan pihak swasta untuk memperhatikan ketenagakerjaan baik mengenai tenaga kerja, kesempatan kerja, permintaan tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja. Regulasi itu dapat dipahami sebagai kewajiban swasta (industri) untuk lebih mengutamakan masyarakat sekitar domisili industri untuk memberikan kesempatan, permintaan, dan penyerapan tenaga kerja industri.

Kondisi ketenagakerjaan khususnya penyerapan tenaga kerja industri di wilayah Desa Sumpersuko Kecamatan Gempol, tidak sejalan dengan aturan regulasi yang ada di Kabupaten Pasuruan tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Penutup

Hasil penelitian di Desa Sumpersuko menjelaskan bahwa jumlah industri skala besar-sedang sebesar 31 (tiga puluh satu) perusahaan yang mampu menyerap minimal 3100 (tiga ribu seratus) tenaga kerja, jumlah masyarakat produktif kerja sebesar 4730 (empat ribu tujuh ratus tiga puluh) orang, dan jumlah masyarakat lokal yang terserap sebagai tenaga kerja industri yaitu 984 orang.

Kondisi ketenagakerjaan (kesempatan kerja) masyarakat lokal memiliki kesempatan kerja industri sebesar 65.53%. hampir setiap masyarakat lokal usia produktif kerja memiliki peluang/ kesempatan kerja industri atau setiap masyarakat lokal produktif kerja dapat memenuhi permintaan tenaga kerja industri. Sementara kondisi ketenagakerjaan (penyerapan tenaga kerja industri) masyarakat lokal sebesar 20.80%.

Kondisi tersebut saat dilihat dari prespektif administrasi pembangunan, industrialisasi di wilayah desa ini membawa dampak positif pada kondisi ketenagakerjaan (peluang/ kesempatan kerja) masyarakat lokal/ masyarakat sekitar industri berada, akan tetapi, belum memberikan dampak positif pada kondisi ketenagakerjaan khususnya penyerapan tenaga kerja industri dari masyarakat lokal/ masyarakat sekitar industri. Dilihat dari perspektif pelayanan publik, belum mampu untuk penyediaan layanan ketenagakerjaan.

Daftar Pustaka

- Ananta, Aris. 1990. *Modal Manusia dan Pembangunan Ekonomi Dalam Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: lembaga Demografi FEUI.
- Asher, Sam. & Novosad, Paul. 2015. *Politics and Local Economic Growth: Evidence from India*. JEL Codes: O12/P16/D72.
- Denscombe, Martyn. 2007. *The Good Research Guide: For Small-Scale Social Research Projects*. Third Edition. New York: Open University Press.
- Dwiyanto, Agus, 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ebrahimi, Mohammad Sadegh & Golabi, Soodeh. 2013. *Analysis of industrial Areas Effects In Rural Development A Case Study of Iran*. Journal of Rural and Industrial Development. Vol.1 issue 2.
- Garvin, D. A. 1987. *Competing on the Eight Dimensions of Quality*. Harvard Business Review, 65 (6).
- Garvin, D.A. 1988. *Managing Quality: The Strategic and Competitive Edge*. in Dale H. Besterfield, Carol Besterfield- Michna, Glen H. Besterfield, Mary Besterfield - Scave (eds), Total Quality Management, New York, Free Press, Prentice-Hall.
- Gemici, Ahu. 2008. *Family Migration and Labor Market Outcomes*. Mimeo New York University.
- George, James Olusoji, Owoyemi Oluwakemi, Onokal Unche. 2012. *Evolution of Employment and Industrial Relations practice: The Nigerian Experience*. International Journal of Business and Social Science. Vol. 3 No. 12
- Grimsey, Darrin and Lewis, Mervyn K. 2004. *Public Private Partnerships: The Worldwide Revolution in Infrastructure Provision and Project Finance*. Cheltenham, UK-Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing Limited.
- Guler, Bulent. Guvenen, Fatih & Violante, Giovanni L. 2009. *Joint-Search Theory: New Opportunities and New Frictions*. Federal Reserve Bank of Minneapolis. Research Department Staff Report 426.
- Hatu, Rauf. 2011. *Perubahan Sosial Kultural Masyarakat Pedesaan*. Jurnal Inovasi. 8. (4).
- Howlett, M & M. Ramesh. 1995. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*. New York: Oxford University Press.
- Kausik, Ritu. 2015. *Rural entrepreneurship and development of rural areas*. International Journal of Commerce and Management Research. ISSN: 2455-1627, Impact Factor: RJIF 5.22. Volume 1; Issue 2.
- Lembaga administrasi Negara (LAN). 2006 *Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*. Jakarta: LANRI
- Miles, M.B. Hubberman, A.M. Saldana, Johny. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Souebook (3rd Edition)*. Arizona State University: Sage Publications.
- Nasution, M.N. 2004. *Manajemen Mutu Terpadu*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Parker dkk. 1992. *Sosiologi Industri*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan.

- Pina, Vicente. Torres, Lourdes & Bachiller, Patricia. 2014. *Service quality in utility industries: the European Telecommunications sector*. Managing Service Quality. Vol. 24 No. 1, pp. 2-22. Emerald Group Publishing Limited. 0960-4529
- Rewansyah, Asmawi. 2011. *Kepemimpinan Dalam Pelayanan Publik*. Jakarta: STIA-LAN.
- Rosen, Harvey S. 1988. *Public Finance*. Illionis: Richard D. Irwin. Inc. Inggris
- Savas, E S. 1987. *Privatization: The Key to Better Government*, Chatham: Catham House Publishers, Inc
- Savas, E.S. 2000. *Privatization and Public Private Partnership*. New Jersey: Chatham House Publisher, Inc.
- Simanjuntak, Payaman J. 1985. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: BPFEUI.
- Sinabela, Lajian Poltak dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Statistik Kecamatan Gempol 2016. Katalog: 1101002.3514.130
- Suu, Nguyen Van. 2009. *Industrialization and Urbanization in Vietnam Ho Appropriation of Agricultural Land Use Rights Transformed Farmers' Livelihoods in a Peri-Urban Hanoi Village?*. Eadn Working Paper.
- Syaifullah. 2009. *Industrialisasi, Manusia Industri dan Perubahan Sosial*. Jurnal Geografi GEA. 9 (1)